BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat dengan menggunakan empat rasio keuangan. Rasio keuangan meliputi rasio kemandirian keuangan derah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio keserasaian belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Berdasarkann analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki pola hubungan konsultatif dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 44,16% yang berarti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah sudah sedikit lebih mampu dakam melaksanakan otonomi. Kemudian delapan belas kabupaten/kota yang lain mendapatkan pola hubungan instruktif yaitu rasio kemandiriannya dari 0-25% yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah tersebut yang berarti tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
2. Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sijunjung menjadi satu-satunya kabupaten/kota dengan kriteria sangat efektif dengan nilai rasio keefektifannya adalah 103,29% yang berarti penerimaan PAD sudah sangat melebihi dari target yang sudah

ditetapkan. Selanjutnya Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok mendapatkan kriteria efektif yang berarti rasio efektivitasnya 90-100%. Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan kriteria cukup efektif pada rasio efektivitas yang mendapatkan persentase 80-90%. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, dan Kota Pariaman mendapatkan kriteria kurang efektif yang mendapatkan nilai rasio 60-80%.

3. Berdasarkan rasio pertumbuhan pandapatan asli daerah, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menjadi kabupaten/kota yang mendapatkan rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD tertinggi sebesar 10,69% dikuti oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rata-rata 9,24% dan Kabupaten Sijunjung dengan rata-rata 6,77%. Sedangkan kabupaten/kota yang menjadi terendah rata-rata rasio pertumbuhan PAD nya yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh yang masing-masingnya mendapatkan rata-rata rasio sebesar -23,43%, -11,91%, dan -9,47. Kabupaten/kota tersebut mendapatkan rata-rata rasio terendah dikarenakan pada dua periode tersebut mereka selalu mendapatkan hasil rasio minus yang berarti rasio pada pertumbuhan PAD nya sangat tidak baik.
4. Rasio keserasian belanja didalamnya terdapat rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio belanja pegawai. Rasio belanja operasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat mengalami fluktasi. Kota Padangpanjang, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang merupakan tiga kabupaten/kota tertinggi rasio

belanja operasinya masing-masing 83,40%, 80,62%, dan 79,91%. Semantara itu tiga kabupaten/kota dengan rasio terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 62,62%, Kabupaten Solok dengan 64,89%, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata rasio belanja operasi 65,98%. Rasio belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat juga mengalami fluktasi. Kota bukittinggi menjadi kabupaten/kota dengan rasio tertinngi dengan 26,99%, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 24,53%, dan Kabupaten Solok Selatan dengan 22,92%. Rasio belanja modal kabupaten/kota tersebut tinggi dikarenakan banyaknya pembangunan pada daerah tersebut. Semantara itu Kabupaten Tanah Datar menjadi kabupaten/kota dengan rata-rata rasio belanja modal terendah dengan 13,12%, diikuti oleh Kabupaten Pasaman dengan 13,69%, dan Kabupaten Solok dengan 14,06%.

5.2 Saran

1. Bagi kabupaten/kota Provinsi Sumatra Barat agar mendapatkan rasio yang lebih baik maka:
   a. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan agar lebih mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang ada dan menambah sumber pendapatan yang baru serta mengurangi ketergantungan pemerintah pusat melalui dana transfer.
   b. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan setiap kabupaten/kota diharapkan agar dapat mempertahankan rata-rata efektivitas penerimaan pendapatan asli daerahnya dan lebih meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah.

c. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan setiap kabupaten/kota diharapkan dapat menekan porsi belanja pegawai tidak lebih dari 30% dengan berbagai cara seperti penerimaan PNSD yang baru dibawah jumlah yang pensiun, menawarkan mutasi terhadap PNSD antar kabupaten/kota yang masih membutuhkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kinerja keuangan setiap kabupaten secara mendalam dan dengan menambah jangkauan penelitiannya.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah serta menjelaskan unsur pendapatan asli daerah apa saja yang lebih berpengaruh terhadap penelitian secara rinci.

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penilaian kinerka keuangan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA